



KEMENPAN RB RESMIKAN MAL PELAYANAN PUBLIK KOTA YOGYA

Dilengkapi Ruang Akad Nikah, Sediakan 25 Anjungan

YOGYA (KR) - Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Yogya akhirnya diresmikan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Kamis (6/10). Di dalamnya terdapat 25 unit anjungan serta ruang untuk menggelar akad nikah.

Penjabat Walikota Yogya Sumadi SH MH, mengungkapkan peluncuran awal MPP dilakukan pada 3 Juni 2021 lalu. "Pada waktu itu hanya ada 19 unit anjungan jenis layanan dan sekarang saat secara resmi diluncurkan berkembang menjadi 25 unit anjungan," jelasnya di sela peluncuran.

Selain dilengkapi ruang akad nikah, sejumlah fasilitas penunjang juga disediakan. Antara lain loket khusus difabel, ruang baca, tempat bermain anak, ruang laktasi maupun ruang konsultasi, informasi dan pengaduan. Pada saat peluncuran kemarin, ruang akad nikah juga sudah dimanfaatkan oleh dua pasang pengantin.

Sumadi menambahkan, dari 25 unit anjungan tersebut, MPP Kota Yogya meny-

ediakan 64 jenis perizinan dan 110 non perizinan. Di samping itu juga enam jenis layanan komersial serta 36 jenis layanan dari instansi vertikal. "Pelayanan publik sangat penting dalam mendukung investasi. Masyarakat juga bisa memilih sesuai yang dikehendaki baik secara offline maupun online," imbuhnya.

Menurutnya, MPP yang berada di kompleks Balai Kota Yogya tersebut memberikan kemudahan akses bagi masyarakat. Bahkan sejak tahun 2018 Pemkot Yogya juga telah mengulirkan aplikasi Jogja Smart Service (JSS) yang kini melayani 211 jenis ragam layanan. Keberadaan JSS bahkan disebutnya sebagai MPP virtual karena memberikan pelayanan publik secara digital. Sekda DIY Kadarmanta Baskara Aji, mewakili Gubernur DIY menyebut layanan publik di Kota Yogya sudah menjadi yang terbaik. Hanya, perlu terus dilakukan inovasi karena mayoritas masyarakat masih mengakses layanan secara offline. "Tadi saya diskusi, per hari rata-rata warga yang datang ke sini mencapai 210 orang. Sedangkan yang mengakses online hanya 50 orang per hari. Tapi harus disiapkan karena kelak pasti akan terbalik, akan banyak yang online dari pada offline," urainya.

Sementara Menpan RB Abdullah Azwar Anas, mengatakan MPP Kota Yogya

merupakan yang kesepuluh di Indonesia serta ketiga di DIY. Dirinya juga memastikan MPP bukan merupakan etalase yang sekadar menyediakan berbagai pelayanan dalam satu ruang, melainkan pusat pelayanan. Oleh karena itu, keberadaan MPP harus memberikan kemudahan, keterjangkauan serta keamanan. Hal ini karena salah satu fungsi MPP ialah untuk mendukung tingkat kemudahan berusaha.



Pejabat Kemenpan RB menyaksikan akad nikah di kompleks MPP Kota Yogya di sela peluncuran.

KR-Ardhi Wahdan

(Dhi)-t

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu P	Positif	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 16 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005